

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
MENGENAI KERJA SAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus (untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk memperkuat lebih lanjut hubungan persahabatan yang ada antara Para Pihak;

MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama mereka untuk mempromosikan dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pada prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

MEYAKINI bahwa kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif akan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dari kedua negara;

MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani pada 12 Mei tahun 2000 di Jakarta;

SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara Para Pihak;

TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara Para Pihak atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2
Bidang Kerja Sama

Para Pihak wajib bekerjasama dalam bidang berikut:

a. Pertanian dan teknologi pangan;
b. Bioteknologi;
c. Nanoteknologi;
d. Sumber Daya Manusia;
e. Energi dan energi terbarukan;
f. Obat-obatan;
g. Ilmu kelautan dan ilmu oseanografi;
h. Geosains;
i. Teknologi Ruang Angkasa;
j. Meteorologi;
k. Telekomunikasi;
l. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok untuk memberikan dasar bagi pengembangan industri;
m. Pengolahan sistem informasi ilmiah;
n. Bidang kerja sama lain yang mungkin dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama

Kerja sama Ilmu pengetahuan dan teknologi antara lembaga ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari kedua negara akan dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

a. Proyek-proyek dan program–program ilmu pengetahuan dan penelitian bersama;
b. Pertukaran kunjungan para ilmuwan, spesialisasi dan ahli;
c. Pertukaran informasi dan dokumen-dokumen ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. konferensi-konferensi ilmiah, seminar-seminar, simposium, pameran ilmu pengetahuan dan teknologi dan acara bersama lainnya;
e. Pendidikan, pelatihan dan partisipasi dalam program-program yang sedang berlangsung; dan
f. Bentuk lain dari kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

Pasal 4
Pihak Berwenang yang Ditunjuk

Setiap Pihak wajib menunjuk badan-badan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Persetujuan ini:

1. Untuk Republik Indonesia adalah Kementerian Riset dan Teknologi.
2. Untuk Republik Belarus adalah Komite Negara untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Republik Belarus.

Pasal 5
Pembentukan Kelompok Kerja Bersama untuk Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mengkoordinasikan kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini (selanjutnya disebut "Kelompok Kerja").

2. Kelompok Kerja akan bertemu setiap tahun atau pada waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak, secara bergantian di Republik Indonesia dan

Republik Belarus untuk membuat rencana kerja dan mengontrol pelaksanaan dan Persetujuan ini.

3. Kelompok Kerja bertanggung jawab untuk:
   a. Memantau dan menganalisa pelaksanaan Program Kerja Sama ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. Mempersiapkan proposal untuk pengembangan dan peningkatan bentuk kerja sama lebih lanjut;
   c. Melakukan kegiatan lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

4. Masing-masing Pihak wajib menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk koordinasi antara dua lembaga dan untuk tugas-tugas rutin Kelompok Kerja.

5. Kelompok Kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada pertemuan Komisi Bersama Perdagangan, Kerja sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus.

6. Komunikasi dalam rangka Kelompok Kerja wajib dilaksanakan melalui saluran diplomatik.

Pasal 6

Pelaksanaan Kerja Sama

1. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Persetujuan ini harus dilakukan melalui pengaturan yang sesuai dan disepakati antara organisasi ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari Para Pihak.

2. Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi, sebagaimana diperlukan, topik kerja sama ilmu pengetahuan dan kerja sama teknologi, cara-cara kerja sama, kewajiban, prosedur untuk transfer dan penggunaan peralatan, persyaratan dan prosedur untuk kerja sama dan isu-isu lainnya. Kesimpulan dari pengaturan tersebut harus sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

3. Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Para Pihak wajib diatur dalam pengaturan khusus dibuat oleh Para Pihak dan/atau organisasi ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari masing-masing negara sesuai dengan kewajiban internasional dari masing-masing negara Para Pihak.

4. Dalam hal diperlukan pertukaran material riset berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama sebagaimana diatur di Pasal 3 Persetujuan ini, dapat dilakukan melalui Perjanjian Alih Material yang terpisah, yang disepakati antara lembaga ilmu pengetahuan dan riset serta lembaga terkait lainnya dari Para Pihak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

Pasal 7

Pengaturan Keuangan

Kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini harus tunduk pada ketersediaan dana dari masing-masing Pihak. Kecuali ditentukan lain dalam pengaturan khusus, setiap Pihak atau lembaga yang berpartisipasi harus menanggung biaya partisipasi dan personilnya dalam kegiatan kerja sama di bawah Persetujuan ini.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual

1. Perlindungan dan alokasi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerja sama berdasarkan Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kewajiban internasional masing-masing negara Para Pihak.

2. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang diperoleh selama kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali informasi komersial rahasia dan informasi lain yang dilindungi sesuai dengan undang-undang nasional Pihak, dapat diungkapkan kepada pihak ketiga dengan pengaturan bersama

dari Para Pihak dan sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

3. Dalam hal pengaturan program atau proyek yang spesifik dapat menimbulkan hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual tersebut harus dimiliki bersama oleh organisasi ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari masing-masing negara Para Pihak sesuai dengan bagian mereka.

4. Organisasi ilmiah dan penelitian serta lembaga terkait lainnya dari masing-masing negara Para Pihak wajib mengadakan pengaturan terpisah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara masing-masing Pihak.

Pasal 9
Kerahasiaan

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan Persetujuan ini atau pengaturan lainnya yang disepakati sesuai dengan Persetujuan ini.

2. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini tetap akan mengikat bagi Para Pihak walaupun berakhirnya Persetujuan ini.

3. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara Para Pihak.

Pasal 10
Pembatasan Kegiatan Personil

Setiap orang dari para pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Persetujuan ini wajib berupaya untuk menghormati kemerdekaan

politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara Pihak lain, dan wajib menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan Persetujuan ini.

Pasal 11
Amandemen

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat, dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik. Perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini dan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Persetujuan ini

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai dengan cara negosiasi dan konsultasi melalui saluran diplomatik.

Pasal 13
Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Persetujuan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan internal untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah itu akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

3. Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2013, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah tersebut memiliki keabsahan sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
GUSTI MUHAMMAD HATTA	**VLADIMIR V. MAKEI**
Menteri Riset dan Teknologi	**Menteri Luar Negeri**



REPUBLIK INDONESIA

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Правительство Республики Индонезия и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем по отдельности Стороной, совместно – Сторонами,

желая в дальнейшем укреплять сложившиеся дружеские отношения между Сторонами,

принимая во внимание взаимный интерес в развитии и поддержке научных исследований и технологического прогресса, основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества в области науки и технологий,

убеждены в том, что эффективное научно-техническое сотрудничество будет способствовать экономическому и социальному развитию обеих стран,

ссылаясь на Соглашение между Правительством Республики Индонезия и Правительством Республики Беларусь об экономическом и техническом сотрудничестве от 12 мая 2000 года,

в соответствии с действующим законодательством обеих государств Сторон,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
Цель

Целью настоящего Соглашения является содействие развитию сотрудничества в области науки и технологий между Сторонами на основе равноправия и взаимной выгоды.

Статья 2
Области сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих областях:

а. сельское хозяйство и пищевые технологии;

б. биотехнологии;

в. нанотехнологии;

г. человеческие ресурсы;

д. энергетика и возобновляемые источники энергии;

е. медицина;

ж. морские науки и океанография;

з. науки о Земле;

и. космические технологии;

к. метеорология;

л. телекоммуникации;

м. наука и технологии для обеспечения основы промышленного развития;

н. система обработки научной информации;

о. другие области по взаимному согласию Сторон.

Статья 3
Формы сотрудничества

Научно-техническое сотрудничество между научно-исследовательскими организациями и другими заинтересованными субъектами обеих стран осуществляется в следующих формах:

а. выполнение совместных научно-исследовательских проектов и программ;

б. обмен визитами ученых, специалистов, экспертов;

в. обмен научно-технической информацией и документацией;

г. проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов, научно-технических выставок и иных совместных мероприятий;

д. обучение, стажировки и участие в действующих программах;

е. другие формы научно-технического сотрудничества, согласованные Сторонами в письменной форме.

Статья 4
Ответственные органы власти

Каждая Сторона определяет органы власти, ответственные за выполнение настоящего Соглашения:

1. от Республики Индонезия - Министерство исследований и технологий Республики Индонезия;
2. от Республики Беларусь - Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Статья 5
Создание Совместной рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству

1. Стороны договорились создать Совместную рабочую группу по научно-техническому сотрудничеству для координации взаимодействия в рамках настоящего Соглашения (далее – Рабочая группа).
2. Рабочая группа будет проводить свои заседания один раз в год или в другое время, согласованное Сторонами, поочередно в Республике Индонезия и Республике Беларусь в целях формирования плана работы и контроля за его выполнением, а также настоящего Соглашения.
3. Рабочая группа несет ответственность за:
   а. осуществление мониторинга и анализа выполнения совместных программ по научно-техническому сотрудничеству;
   б. подготовку предложений по дальнейшему развитию и укреплению форм сотрудничества;
   в. выполнение других форм деятельности по взаимному согласию Сторон.
4. Каждая Сторона определяет ответственное лицо для осуществления взаимодействия между двумя органами власти и выполнения текущей деятельности Рабочей группы.
5. Рабочая группа докладывает о своей деятельности на заседании Совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Правительством Республики Индонезия и Правительством Республики Беларусь.
6. Взаимодействие в рамках Рабочей группы осуществляется по дипломатическим каналам.

Статья 6
Реализация сотрудничества

1. Сотрудничество, предусмотренное статьей 2 настоящего Соглашения, осуществляется посредством заключения соответствующих соглашений между научно-исследовательскими организациями и другими заинтересованными субъектами Сторон.
2. В данных соглашениях предусматриваются при необходимости тематика научно-технического сотрудничества, способы организации сотрудничества, обязательства, процедура передачи и использования оборудования, сроки и порядок осуществления сотрудничества, а также другие вопросы. Данные соглашения заключаются в соответствии с нормами, процедурами и действующим законодательством каждого из государств Сторон.
3. Вопросы доступа к генетическим ресурсам и традиционным знаниям Сторон регулируются отдельными соглашениями, заключенными между Сторонами и (или) научно-исследовательскими организациями и другими заинтересованными субъектами каждого государства, в соответствии с международными обязательствами государств Сторон.
4. Материалы, необходимые для проведения исследований в рамках реализации сотрудничества в формах, указанных в статье 3 настоящего Соглашения, передаются посредством заключения отдельных соглашений о передаче материалов на исследования между научно-исследовательскими организациями и другими заинтересованными субъектами Сторон в соответствии с действующим законодательством каждого из государств Сторон.

Статья 7
Финансовые вопросы

Совместная деятельность в рамках настоящего Соглашения осуществляется в зависимости от наличия у каждой из Сторон соответствующих ресурсов. Если иное не предусмотрено конкретными договоренностями, каждая Сторона или сотрудничающая организация несет расходы за свое участие и участие своих сотрудников в совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения.

Статья 8
Права на объекты интеллектуальной собственности

1. Охрана и распределение прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон.
2. Научно-техническая информация, полученная в результате совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну и иную, охраняемую в соответствии с национальным законодательством Сторон тайну, может передаваться третьим лицам с согласия Сторон и в соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством каждого из государств Сторон.
3. Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках отдельных соглашений, программ или проектов, совместно принадлежат научно-исследовательским организациям и другим

заинтересованным субъектам каждого из государств Сторон в соответствии с долей их участия.

4. Научно-исследовательские организации и другие заинтересованные субъекты каждого из государств Сторон могут заключать отдельные соглашения в соответствии с действующим законодательством государств Сторон.

Статья 9
Конфиденциальность

1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность документов, информации и других данных, полученных или переданных другой Стороне в рамках реализации настоящего Соглашения или других соглашений, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением.
2. Стороны договорились, что положение настоящей статьи продолжает иметь обязательную силу для Сторон независимо от прекращения действия настоящего Соглашения.
3. Положение настоящей статьи не будет нарушать действующее законодательство государств Сторон.

Статья 10
Ограничение деятельности

Любое лицо одной Стороны, занимающееся деятельностью, связанной с настоящим Соглашением, обязуется уважать политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность государства другой Стороны и будет избегать любой деятельности, не совместимой с целями настоящего Соглашения.

Статья 11
Изменения и дополнения

В настоящее Соглашение с письменного согласия Сторон могут вноситься изменения и дополнения по дипломатическим каналам. Такие изменения и дополнения являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения и вступают в силу в порядке, предусмотренном в статье 13 настоящего Соглашения.

Статья 12
Урегулирование разногласий

Разногласия между Сторонами относительно толкования или применения положений настоящего Соглашения разрешаются дружественным путем посредством проведения переговоров и консультаций по дипломатическим каналам.

Статья 13
Вступление в силу, действие и прекращение действия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последней ноты, подтверждающей выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
2. Настоящее Соглашение действует на протяжении пяти лет и автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не получит от другой Стороны письменное уведомление о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока его действия.

3. Расторжение действия настоящего Соглашения не повлияет на завершение совместных программ по научно-техническому сотрудничеству, заключенных в рамках настоящего Соглашения.

В удостоверении чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то уполномоченными, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в г. Джакарте 19 марта 2013 г. в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты равно аутентичны. В случае расхождения в толковании преимущество имеет текст на английском языке.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ	ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
	
ГУСТИ МОХАММАД ХАТТА	**ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАКЕЙ**
Министер исследований и технологий	**Министр иностранных дел**



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus (hereinafter individually referred to as the "Party", and collectively referred to as the "Parties");

DESIRING to strengthen further friendly relations existing between the Parties;

CONSIDERING their common interest to promote and encourage scientific and technological progress based on the principles of mutually beneficial cooperation in the fields of science and technology;

CONVINCED that effective science and technology cooperation will promote economic and social development of both countries;

REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Economic and Technical Cooperation signed on May 12, 2000 in Jakarta;

PURSUANT to the laws and regulations in force in both countries of the Parties;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Objective

The objective of this Agreement is to promote cooperation in the fields of science and technology between the Parties on the basis of equality and mutual benefit.

Article 2
Areas of Cooperation

The Parties shall cooperate in the following areas:

a. Agriculture and food technology;
b. Biotechnology;
c. Nanotechnology;
d. Human Resources;
e. Energy and renewable energy;
f. Medicine;
g. Marine sciences and oceanography;
h. Geosciences;
i. Space technology;
j. Meteorology;
k. Telecommunication;
l. Science and technology suitable to provide a basis for industrial development;
m. Processing system of scientific information;
n. Any other areas may be mutually agreed by the Parties.

Article 3
Forms of Cooperation

Science and technology cooperation between scientific and research organizations and other concerned entities from both countries shall be carried out in the following forms:

a. Joint scientific and research projects and programs;

b. Exchange of visits of scientists, specialists and experts;
c. Exchange of science and technology information and documents;
d. Scientific conferences, seminars, symposia, science and technology exhibitions and other joint events;
e. Education, training and participation in ongoing programs; and
f. Other forms of science and technology cooperation which will be mutually agreed in writing by the Parties.

Article 4
Designated Authorities

Each Party shall designate the bodies responsible for implementation of the present Agreement:

1. For the Republic of Indonesia is the Ministry of Research and Technology.
2. For the Republic of Belarus is the State Committee on Science and Technology of the Republic of Belarus.

Article 5
Establishment of Joint Working Group on Science and Technology Cooperation

1. The Parties agreed to establish the Joint Working Group on Science and Technology Cooperation to coordinate cooperation in the framework of the present Agreement (hereinafter referred to as "Working Group").

2. The Working Group shall meet annually or at a time as mutually agreed by the Parties, alternately in the Republic of Indonesia and the Republic of Belarus to make a work plan and control its implementation and the present Agreement.

3. The Working Group shall be responsible for:
   a. Monitoring and analyzing the implementation of the joint science and technology cooperation programs;

b. Preparing of proposal on the further development and improvement of cooperation forms;
c. Performing other activities as may be mutually agreed upon by the Parties.

4. Each Party shall designate its responsible person for coordination between two bodies and for the routine duties of the Working Group.

5. The Working Group shall report its activities to the meeting of the Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus.

6. Communications in the framework of the Working Group shall be established through diplomatic channels.

Article 6

Implementation of Cooperation

1. Cooperation set forth in Article 2 of the present Agreement shall be carried out through appropriate agreements concluded between scientific and research organizations and other concerned entities of the Parties.

2. These agreements shall cover, as appropriate, topics of science and technology cooperation, means of cooperation, obligations, procedures for transfer and use of equipment, terms and procedure for cooperation and other issues. The conclusion of these agreements shall be in accordance with the laws, regulations and the procedures in force in each country of the Parties.

3. Access to the Genetic Resources and Traditional Knowledge of the Parties shall be regulated in specific arrangements concluded by the Parties and/or scientific and research organizations and other concerned entities of each country in accordance with international obligations of the countries of the Parties.

4. In the event that required research and materials used under collaboration carried out in the forms set forth in Article 3 of the present Agreement may be transferred through separate Material Transfer Agreements concluded between scientific and research organizations and other concerned entities of the Parties in accordance with the laws and regulations in force in each country of the Parties.

Article 7
Financial Arrangements

Cooperative activities under the present Agreement shall be subject to the availability of funds of each Party. Unless otherwise provided for in specific arrangements, each Party or participating entity shall bear the cost of its participation and that of its personnel in cooperative activities under the present Agreement.

Article 8
Intellectual Property Rights

1. Protection and allocation of the intellectual property rights resulting from the cooperation under the present Agreement shall be implemented in accordance with the national legislation and the international obligations of each country of the Parties.

2. Science and technology information obtained during cooperation within the framework of the present Agreement, excluding confidential commercial information and other information protected in accordance with the national legislation of the Parties, can be disclosed to the third party by mutual consent of the Parties and in accordance with the international obligations and legislation in force of each country of the Parties.

3. In case specific arrangement, programs or projects may result in intellectual property rights, such intellectual property rights shall be jointly owned by

scientific and research organizations and other concerned entities of each country of the Parties in accordance with their share.

4. Scientific and research organizations and other concerned entities of each country of the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with the laws and regulations in force of each country of the Parties.

Article 9
Confidentiality

1. The Parties shall undertake to observe the confidentiality of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of implementation of the present Agreement or any other agreements concluded pursuant to the present Agreement.

2. The Parties agreed that the term of present Article shall continue to be binding for the Parties notwithstanding the termination of the present Agreement.

3. The term of the present Article shall not violate the legislation in force of the countries of the Parties.

Article 10
Limitation of Personnel Activities

Any persons of the Party engaged in activities related to the present Agreement shall undertake to respect political independence, sovereignty and territorial integrity of the country of the other Party, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes of the present Agreement.

Article 11
Amendment

The present Agreement may be amended at any time, by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such amendments are

integral parts of the present Agreement and shall enter into force in accordance with the terms of Article 13 of the present Agreement.

Article 12
Settlement of Disputes

Any disputes between the Parties arising out of the interpretation or implementation of the terms of the present Agreement shall be resolved amicably by means of negotiations and consultations through diplomatic channels.

Article 13
Entry Into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other that internal requirements for entering into force of this Agreement have been fulfilled.

2. The present Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years, there after it shall be automatically extended for further periods of 1 (one) year, unless either Party receives written notification from the other Party of its intention to terminate the present Agreement at least 6 (six) months before the intended date of termination.

3. The termination of the present Agreement shall not affect the completion of joint science and technology cooperation programs concluded under the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Jakarta on the 19th day of March 2013, each in Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GUSTI MUHAMMAD HATTA
Minister for Research and Technology

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS

VLADIMIR V. MAKEI
Minister of Foreign Affairs